



BPK Ingatkan Penggunaan Dana Asing

Sepakat 2014 Jadi Pemilu Berkualitas

JAKARTA - Pertemuan presiden dan wakil presiden bersama para pimpinan lembaga tinggi negara yang berlangsung kemarin menghasilkan sejumlah poin kesepakatan penting. Secara garis besar, para petinggi negeri ini sepakat tentang perlunya sama-sama menjaga Pemilu 2014 menjadi pemilu yang berkualitas.

"Diharapkan kesuksesan pemilu legislatif dan pemilu presiden dapat dijadikan prioritas ataupun agenda utama dalam pelaksanaan tugas-tugas lembaga negara," kata Ketua MPR Sidarto Danusubroto saat menjelaskan hasil pertemuan di ruang delegasi, kompleks parlemen, Jakarta, kemarin (20/3).

Kali ini MPR bertindak sebagai tuan rumah dalam pertemuan rutin yang dilaksanakan mulai 2009 tersebut. Selain ketua MPR, hadir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Boediono, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Ir-

man Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, dan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki.

Di antara 18 poin kesepakatan, salah satunya tentang peringatan yang disampaikan BPK. Lembaga auditor negara itu mengingatkan seluruh peserta pemilu agar tidak menerima sumbangan dari pihak-pihak asing dan pihak lain yang dilarang ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditemui setelah pertemuan, Hadi Poernomo mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengantongi izin untuk mengawasi keuangan peserta pemilu.

Pada pasal 305 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan, parpol yang terbukti menerima sumbangan dari pihak-pihak yang dilarang terancam pidana tiga tahun penjara dan denda paling banyak Rp 36 juta. (*dyn/c7/fat*)